



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



DJPb  
Indonesian Treasury



Hari Bakti  
Perbendaharaan

Dua Dekade Indonesian Treasury  
Terus Bertransformasi Dalam Melayani Negeri



# SIPIIN

SEPUTAR INFORMASI PERKEMBANGAN FISKAL & EKONOMI

Vol. 01 Tahun 2024



# Kata Pengantar



**BURHANI AS**

Kepala Kanwil DJPb  
Provinsi Jambi



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Mini Buletin Sekilas Informasi Perkembangan Fiskal dan Ekonomi (Mini SIPIN) Vol. 01 Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Buletin ini disusun selain sebagai sarana informasi kinerja dan capaian APBN dan APBD dan publikasi implementasi *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor* guna mendukung akselerasi pembangunan di Provinsi Jambi, juga sebagai bahan bacaan yang kami dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

Kami harap, SIPIN dapat memberi manfaat kepada para pembaca. Kami akan terus mengharapkan umpan balik yang membangun dari para pembaca sehingga buletin ini semakin sempurna.

***"Naik sepeda ke arah Broni  
Tujuan utama ke Gentala Arasyi  
Selamat membaca buletin ini  
Semoga bermanfaat dan menginspirasi"***

Selamat membaca bulletin SIPIN ini  
Semoga bermanfaat dan menginspirasi

# DAFTAR ISI

01

## Realisasi APBN dan Tematik

- Realisasi APBN
- Kartu Kredit Pemerintah

03

## Pojok TKD

- Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa s.d. 31 Januari 2024
- Yuk Kenal TKD!

05

## Pojok UMKM

- Realisasi Penyaluran KUR-UMi sampai dengan 31 Januari 2024

07

## Pojok Peraturan

- Gaji ASN Naik, Bantu Pertumbuhan Ekonomi

08

## Pojok Akuntansi

- Sekilas Info Akuntansi: PSAP 01-Penyajian Laporan Keuangan

09

## Festival Kenduren

10

## Kegiatan Kanwil

12

## Kegiatan KPPN

13

## Pojok Kemenkeu Satu

- Tim Sekretariat Bersama, Perkuat Koordinasi Kemenkeu di Daerah

14

## Fun Games

# REALISASI APBN

## LINGKUP PROVINSI JAMBI

### PENERIMAAN NEGARA



Realisasi pendapatan negara regional Jambi sampai dengan 31 Januari 2024 sebesar Rp564,70 M atau mengalami kontraksi sebesar 14,89% (y-o-y). Hal ini disebabkan oleh turunnya penerimaan yang cukup signifikan pada jenis Pajak Penghasilan Non Migas sebesar 33,81% (y-o-y). Meskipun demikian, dari Total Pendapatan Negara PPN masih mendominasi penerimaan pajak terbesar dengan kontribusi sebesar 47,51% dari Total Pendapatan. Realisasi atas PNPB Lainnya juga tercatat sebesar Rp70,02 M. Capaian bulan ini merupakan capaian terbesar selama 5 tahun terakhir untuk bulan Januari. Terjadi peningkatan signifikan Rp31,48 M atau hampir 2 kali



lipat dibandingkan Januari tahun lalu. Peningkatan terbesar terjadi pada Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (Rp38,58 M) dan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (Rp3,8 M).

### BELANJA NEGARA



Pada sisi belanja, realisasi sampai dengan 31 Januari 2024 sebesar Rp1.483,72 miliar atau terelaksasi sebesar 24,18% (y-o-y), terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp229,64 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) sebesar Rp1.254,08 miliar. Dengan demikian, terjadi defisit regional sebesar Rp919,02 miliar.

Belanja Pemerintah Pusat per Januari 2024 tumbuh cukup baik terutama untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Belanja Pegawai tumbuh karena peningkatan pegawai P3K dan petugas pemilu di KPU dan Bawaslu. Sedangkan, Belanja Barang tumbuh karena peningkatan Belanja Barang pada satker-satker KPU dan Bawaslu dalam rangka pemilu/pilkada 2024. Belanja Modal mengalami kontraksi karena satker PJJ I dan PJJ II masih fokus pada penyelesaian pekerjaan melalui RPATA 2023 sehingga belum terdapat realisasi di bulan Januari untuk proyek 2024. Belanja Bansos, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, belum terdapat penyaluran bansos di bulan Januari.

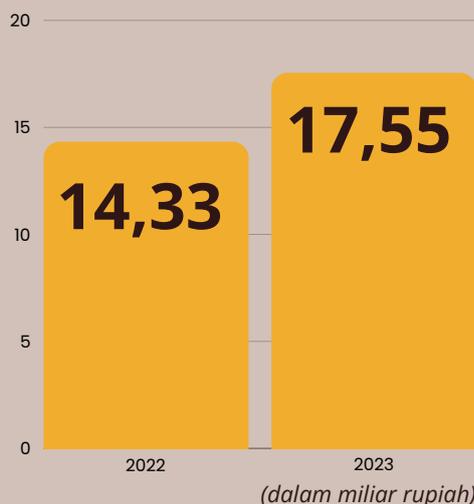
Volume 01 | Januari 2024



# KARTU KREDIT PEMERINTAH

Akhir-akhir ini, pemanfaatan teknologi pembayaran digital menjadi lebih populer di Indonesia. Keberadaan dompet digital yang dianggap lebih efisien dan lebih aman daripada uang tunai, sedikit demi sedikit telah menggeser metode pembayaran yang biasanya dilakukan secara tunai menjadi non-tunai. Penggunaan pembayaran non-tunai di Indonesia meningkat saat adanya Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014. Gerakan ini sejalan dalam mendukung Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan RI yang salah satunya adalah pengelolaan keuangan negara dengan keuangan modern serta mampu mendukung inklusi keuangan.

Sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan pembayaran APBN secara digital, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan sebuah Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang telah berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019. KKP adalah kartu yang diberikan kepada satuan kerja sebagai alat pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBN. Penerbitan KKP hanya dilakukan oleh Bank Pemerintah yang telah menjalin hubungan kerja sama dengan DJPb. Pada umumnya, mekanisme penggunaan KKP sama dengan kartu kredit biasa yaitu kewajiban satker (pemegang kartu) akan dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak bank terkait dan satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Akan tetapi, terdapat sedikit perbedaan dari sisi peruntukannya, KKP hanya dikhususkan untuk belanja barang operasional, belanja modal, dan belanja perjalanan dinas jabatan yang memang dibiaya oleh uang persediaan (UP).



Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di Provinsi Jambi juga menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2023 sudah sebanyak 87 satker di Provinsi Jambi yang telah menggunakan KKP, jumlah ini naik daripada tahun 2022 yang hanya sebanyak 79 satker pengguna KKP. Kenaikan juga terjadi pada realisasi belanja menggunakan KKP sebesar Rp17,55 Miliar atau 0,29% dari total realisasi belanja barang dan modal. Nominal ini naik Rp3,22 M (22,49%) dibanding dengan tahun 2022 dengan transaksi sebesar Rp14,33 Miliar. Kenaikan signifikan sebesar hampir Rp2,48M (346,92%) terjadi pada satker-satker KPU dan Bawaslu terutama untuk keperluan tahapan persiapan pemilu pada 2023. Pada awal tahun 2024, realisasi belanja dengan KPP sudah mencapai Rp560 Juta dan diharapkan akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun 2024.

Seiring dengan meningkatnya realisasi belanja dengan KKP menunjukkan kesadaran satker untuk meminimalisir adanya potensi kesalahan (fraud) atau kecurangan transaksi fiktif. Dalam hal ini, transaksi dengan menggunakan KKP lebih transparan dikarenakan semua transaksi terpindai secara elektronik dan telah terverifikasi bukti transaksi hingga rincian tagihan.

# PERKEMBANGAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA S.D. 31 JANUARI 2024

Dalam mendukung pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa melalui penyaluran transfer ke daerah dan dana desa, realisasi TKDD di wilayah Jambi sampai dengan 31 Januari 2024 telah terealisasi Rp1.254,08 M atau 8,57%. Penyaluran TKDD mengalami peningkatan sebesar 26,04% (yoy) apabila dibandingkan Januari 2023. Peningkatan ini diakibatkan oleh kenaikan nilai penyaluran DAK Nonfisik sebesar 100% dan Dana Bagi Hasil sebesar 19,54%. Peningkatan DAK Nonfisik didorong oleh percepatan penyaluran dana Bantuan Operasional sekolah, Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan dan Bantuan Operasional Pendidikan PAUD. Penyaluran Dana Bagi Hasil tumbuh didorong oleh percepatan penyaluran DBH SDA Minerba, DBH SDA Panas Bumi, dan DBH SDA Perikanan.

Jenis TKD	Pagu	Relisasi s.d. Januari 2024	%
<b>DBH</b>	<b>2.278,69</b>	<b>91,30</b>	<b>4,01%</b>
<b>DAU</b>	<b>8.230,34</b>	<b>788,00</b>	<b>9,57%</b>
<b>DAK Fisik</b>	<b>932,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>DID</b>	<b>49,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>DAK Nonfisik</b>	<b>1.971,58</b>	<b>374,78</b>	<b>19,01%</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>1.178,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Transfer Hibah</b>	<b>31,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total</b>	<b>14.672,57</b>	<b>1.254,08</b>	<b>8,57%</b>

Namun di sisi lain, terdapat penurunan nilai DAU sebesar -14,22%. Penyaluran DAU mengalami penurunan yang diakibatkan terdapat belum tersalurnya DAU yang tidak ditentukan penggunaannya pada Kabupaten Batanghari dan Tanjung Jabung Timur karena keterlambatan penyampaian tambahan syarat salur berupa laporan tahunan DAU Spesific Grant tahun 2023, serta terdapat penundaan penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya Bulan Februari 2024 sebesar 25% untuk Provinsi Jambi, Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi karena belum menyampaikan data/informasi keuangan. Sementara itu, DAK Fisik, DID, Dana Desa, dan Transfer Hibah belum terdapat penyaluran pada bulan Januari 2024.

# Yuk Kenal TKDD !

## Dana Bagi Hasil

Pernahkah kalian mendengar Dana Bagi Hasil? Dana Bagi Hasil atau yang disingkat menjadi DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pengelolaan Dana Bagi Hasil diatur dalam PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Dana Bagi Hasil terdiri dari 3 jenis yaitu DBH Pajak, DBH SDA (Sumber Daya Alam), dan DBH Lainnya. DBH Pajak terbagi lagi menjadi 3 jenis yaitu; DBH Pajak PPH, DBH Pajak PBB, dan DBH Pajak CHT. Sementara itu, DBH SDA terbagi menjadi 5 yaitu DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Migas, DBH SDA Minerba, DBH SDA Perikanan, dan DBH SDA Panas Bumi. Untuk DBH Lainnya terdiri dari DBH Perkebunan Sawit.

Dalam alokasi 2024, DBH SDA mendominasi dengan proporsi sebesar 61% dari total DBH, diikuti DBH Pajak dengan proporsi sebesar 31%, dan DBH Lainnya dengan proporsi sebesar 7% dari total DBH. Sampai dengan 31 Januari 2024, penyaluran DBH di Provinsi Jambi sebesar 91,30 Miliar atau 4,01% dari total alokasi DBH sebesar 2,28 Triliun.

Dalam 5 tahun terakhir, alokasi DBH mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Secara persentase penyaluran, penyaluran DBH mengalami penurunan terutama pada tahun 2022. Namun, menunjukkan perbaikan di tahun 2023 dengan penyaluran DBH mencapai 99,75% dari pagu sebesar 3,18 Triliun. Meskipun alokasi DBH TA 2024 menurun dibandingkan dengan alokasi DBH TA 2023, diharapkan penyaluran dan penyerapan tahun ini dapat dilaksanakan secara maksimal.





# REALISASI PENYALURAN KUR-UMI SAMPAI DENGAN 31 JANUARI 2024

Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Jambi tahun 2024 s.d. 31 Januari 2024 telah disalurkan kepada 5.655 debitur dengan total penyaluran adalah Rp456,49 M (7,7% dari target Rp5.940 miliar). Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini hingga 31 Januari 2024 skema pinjaman KUR Mikro mengambil porsi terbesar. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian perburuan dan kehutanan dengan jumlah Penyaluran Rp301,77 M (66,1%), sedangkan secara nasional didominasi sektor perdagangan besar dan eceran (45,67%). Dibandingkan tahun 2023, penyaluran 2024 s.d. 31 Januari 2024 tumbuh 64.559% (yoy). Hal ini dikarenakan pada awal tahun 2023 terdapat perubahan Permenkop KUR sehingga tidak ada penyaluran KUR oleh Bank.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Provinsi Jambi tahun 2024 sampai dengan 31 Januari 2024 telah disalurkan kepada 102 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp0,91 M. Pada tahun-tahun sebelumnya, skema terbanyak adalah skema kelompok dengan dominasi penyalur UMi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 sampai dengan 31 Januari 2024 skema terbanyak adalah skema individu, dengan penyalur KSP Karya Mandiri. Debitur UMi di Provinsi Jambi didominasi oleh debitur dari wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo. Penyaluran pada tahun s.d. 31 Januari 2024 mengalami penurunan sebesar 90,5% (yoy). Penyaluran UMi di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 10,22% dari penyaluran di Sumatera dan 0,79% terhadap penyaluran nasional.

# TELANAI CHOCOLATE

Telanai Chocolate adalah cokelat batang yang diproduksi dari biji cokelat dari Jambi.

Tersedia dalam 2 varian yaitu Dark Chocolate dan Milk Chocolate dengan ukuran 20 gram dan 50 gram. Cocok untuk oleh-oleh maupun cemilan pribadi.



UMKM Telanai Chocolate merupakan pemenang 5 besar dalam LPDP Business Competition 2023 mewakili Sumatera Bagian Selatan.

**PEMBELIAN  
DAPAT MELALUI:**

<https://www.instagram.com/telanaichocolate> atau  
085179577851





# GAJI ASN NAIK, BANTU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pada tanggal 16 Agustus 2023 lalu, saat penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya dalam sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan gaji ASN sebesar 8%.

Lalu belum lama ini, pada tanggal 26 Januari 2024, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas PP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Aturan ini merubah aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 15 Tahun 2019 yang diterbitkan lima tahun silam.

Sudah 5 Tahun berlalu sejak kenaikan gaji ASN terakhir kali, akan berimbas kemana saja kenaikan gaji ASN kali ini? Banyak yang menilai dengan adanya kenaikan gaji akan mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan konsumsi masyarakat Indonesia masih banyak bergantung terhadap domestic demand, belum lagi tahun 2024 bertepatan dengan pesta demokrasi. Dengan kondisi strategis ini, tentunya dinilai akan mendorong konsumsi masyarakat.



Sumber Foto: <https://www.menpan.go.id>

Misalnya, pada Sektor UMKM apabila daya beli terdampak positif akan meningkatkan pembelian produk UMKM yang mengakibatkan akan semakin tumbuhnya sektor ini. Dengan berbagai jenis produk UMKM yang tersebar luas di berbagai penjuru daerah pada saat ini, tentunya akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing.

Tidak berlebihan bukan apabila kenaikan gaji kali ini dinilai dapat menambah dan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi peningkatan ekonomi dan pembangunan nasional? Diharapkan melalui kenaikan gaji ini juga dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN, mengurangi dampak inflasi yang dirasakan para ASN, serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

**Kenaikan Gaji PNS Sebanyak 8%  
Akan Berlaku Mulai 1 Januari 2024**

<b>Sebelum</b>	
Gol I	: Rp 1.560.800 - Rp 2.686.500
Gol II	: Rp 2.022.200 - Rp 3.820.000
Gol III	: Rp 2.579.400 - Rp 4.797.000
Gol IV	: Rp 3.044.300 - Rp 5.901.200
<b>Setelah Kenaikan 8%</b>	
Gol I	: Rp 1.685.664 - Rp 2.901.420
Gol II	: Rp 2.183.976 - Rp 4.125.600
Gol III	: Rp 2.785.752 - Rp 5.180.760
Gol IV	: Rp 3.287.844 - Rp 6.373.296

# SEKILAS INFO AKUNTANSI: PSAP 01-PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

## Tahukah kalian tentang PSAP 01?

PSAP 01 merupakan pernyataan standar akuntansi pemerintahan tentang penyajian laporan keuangan yang bertujuan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

PSAP 01 berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Kemudian apa sih tujuan dari disusunnya laporan keuangan? Yap, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal ini diantaranya aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan-LO, beban, dan arus kas.

Komponen-komponen laporan keuangan diantaranya Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.



# FESTIVAL KENDUREN

Festival Durian (Kenduren) diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bekerjasama dengan masyarakat Desa Danau Lamo dalam rangka pemajuan kebudayaan. Di tahun 2024, Kenduren dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Januari 2024 bertempat di tepian Sungai Buluh (lingkungan Candi Kedaton). Kanwil DJPb Provinsi Jambi juga berpartisipasi loh dalam acara ini.



# KEGIATAN KANWIL

## Tasyakuran Hari Bakti Perbendaharaan Ke-20

Ditjen Perbendaharaan memasuki usia yang ke-20 tahun. Kanwil DJPb Jambi menyelenggarakan tasyakuran pada hari Senin, 15 Januari 2024 untuk merayakan Hari Bakti Perbendaharaan ke-20. Tema yang diusung “Dua Dekade Indonesian Treasury, Terus Bertransformasi dalam Melayani Negeri” sebagai wujud semangat Ditjen Perbendaharaan untuk terus memberikan yang terbaik kepada bangsa, negara, dan masyarakat, melalui perbaikan berkelanjutan dari sisi tugas, fungsi, dan organisasi serta mendukung transformasi “Kemenkeu Melayani Lebih Baik”.



## Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi

Kanwil DJPb melakukan kunjungan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi pada Selasa, 16 Januari 2024 dalam rangka melaksanakan Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi serta memastikan lancarnya pelaporan LRA Pemda dengan sinkronisasi penyediaan data pada Aplikasi SIKD Kementerian Keuangan, dan meminta dukungan data terkait Pagu dan Realisasi Belanja Stunting serta Data Prevalensi Stunting untuk periode 2018-2023.



# Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran, Sosialisasi Peraturan dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2024

Kanwil DJPb Jambi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran pada hari Rabu, 17 Januari 2024. Acara ini diselenggarakan dengan harapan agar para satuan kerja dapat segera melaksanakan realisasi anggarannya sehingga output dan outcome yang diharapkan dapat dicapai dengan maksimal sehubungan dengan telah diserahkannya DIPA TA. 2024 secara digital.

Pada acara tersebut, dilakukan juga pemberian penghargaan pada satker-satker dengan capaian IKPA terbaik yang terbagi pada tiga kategori, yakni satker dengan kategori pagu besar (pagu diatas 40 Milyar); pagu sedang (10 s.d. 40 Milyar); dan pagu kecil (dibawah 10 Milyar).



## Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan LK Tingkat UAPPA-W lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi Tahun 2023 (Unaudited)

Dalam rangka mengawal penyusunan LK K/L Tahun 2023 (Unaudited), Kanwil DJPb Provinsi Jambi menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penyampaian LK UAPPA-W lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi Tahun 2023 (Unaudited) dengan mengundang 29 UAPPA-W dan KPPN di Provinsi Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Januari 2024 secara hybrid di Aula Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan Teams Meeting.



# KEGIATAN KPPN



## **FGD PERCEPATAN PENYALURAN DANA DESA TA 2024**

KPPN Jambi menyelenggarakan FGD ini pada Selasa, 30 Januari 2024 bertempat di Aula KPPN Jambi. FGD ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada pemda terkait persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I TA 2024 dan mendorong percepatan penyaluran Dana Desa

## **FGD PERCEPATAN PENYALURAN DANA DESA TA 2024**

KPPN Muara Bungo menyelenggarakan FGD Penyaluran Transfer ke Daerah pada Selasa, 30 Januari 2024 bertempat di Aula KPPN Muara Bungo. Pada FGD ini disampaikan Evaluasi Transfer ke Daerah Tahun 2023 dan Sosialisasi Penyaluran TKD Tahun 2024.



## **FGD PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2024**

KPPN Sungai Penuh menyelenggarakan FGD Penyaluran Transfer ke Daerah Triwulan I Tahun 2024 pada Rabu, 31 Januari 2024 bertempat di Aula KPPN Sungai Penuh. Melalui FGD ini, telah disampaikan evaluasi penyaluran TKD, mekanisme penyaluran Dana Desa, serta pemberian solusi atas permasalahan pada Pemda Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

## **FGD PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH SEMESTER I 2024**

KPPN Bangko menyelenggarakan FGD ini pada Senin, 22 Januari 2024 bertempat di Aula KPPN Bangko. Adanya FGD ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait Mekanisme Penyaluran TKD TA 2024 dan memberikan evaluasi pelaksanaan penyaluran TKD tahun 2023 agar di Tahun 2024 penyaluran TKD berjalan dengan baik.



## **FGD PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

KPPN Kuala Tungkal menyelenggarakan FGD ini pada Senin, 29 Januari 2024 bertempat di Aula KPPN Kuala Tungkal. Adanya FGD ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyaluran Dana Desa Tahun 2024.



## TIM SEKRETARIAT BERSAMA, PERKUAT KOORDINASI KEMENKEU DI DAERAH



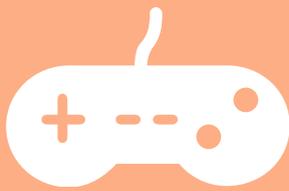
**Irwan Wahyu Basuki**  
Kepala Sekretariat Bersama  
Wilayah Jambi

Apakah pembaca tahu kalau Kementerian Keuangan mempunyai perwakilan di setiap daerah? Pada awalnya, hanya terdapat sekretaris saja sebagai perwakilan Kemenkeu di setiap Provinsi. Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 394/KMK.01/2022 tentang Perwakilan Kementerian Keuangan, dibentuklah kesekretariatan Kemenkeu yang di dalamnya terdapat beberapa pokja, yaitu Pokja Teknis Joint Program Penerimaan, Pokja Teknis Joint Program UMKM, dan Pokja Teknis Regional Chief Economist.

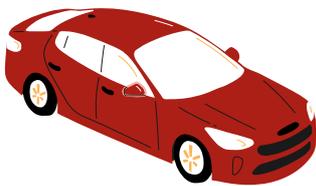
Pembentukan tim tersebut ditujukan tidak lain untuk mempermudah koordinasi bersama antar unit eselon I Kemenkeu di daerah, seiring dengan tugas dan fungsi Kemenkeu yang semakin agile dan adaptif terhadap pertumbuhan dan perkembangan yang ada.

Ketua Sekretariat Tim Setber Wilayah Jambi, Irwan Wahyu Basuki, mengungkapkan harapan dengan adanya kesekretariatan ini, khususnya di Provinsi Jambi dapat semakin menjalin koordinasi yang baik, memperkuat kekompakan dan sinergi yang luar biasa sehingga rencana-rencana kegiatan yang telah disusun melalui pokja masing-masing dapat disinergikan dan diupayakan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Selain itu, dengan monitoring yang juga dilakukan oleh tim kesekretariatan diharapkan semua program yang ada dapat terlaksana dan tertata dengan lebih baik lagi.

# Fun Games Mini SIPIN



Ayo tebak kata  
berikut ini !



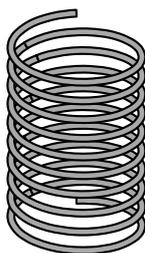
SE

+

AU



+



+



+



U = E

PELT

## Syarat dan Ketentuan:

1. Kirim jawaban Anda ke alamat email [djpbjambi@gmail.com](mailto:djpbjambi@gmail.com) dengan subjek Fun Games Mini SIPIN.
2. Jawaban disertai data diri berupa nama, nomor telepon dan email.
3. Jawaban paling lambat diterima pada pukul 23.59 WIB tanggal 20 Maret 2024.
4. Nama pemenang akan diumumkan pada Majalah Mini SIPIN edisi berikutnya.
5. Hadiah dikirim ke nomor telepon pemenang sesuai informasi yang diberikan dan konfirmasi melalui nomor telepon.

SEMUA LAYANAN KANWIL

Rp O

DJPB PROVINSI JAMBI

## SALURAN PENGADUAN

SMS



0852-8266-0367 | [s.id/Pengaduan06](https://s.id/Pengaduan06)



[kanwiljambi.pengaduan@gmail.com](mailto:kanwiljambi.pengaduan@gmail.com)



[djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jambi](https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jambi)



[pengaduandjpb.kemenkeu.go.id](https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id)



[wise.kemenkeu.go.id](https://wise.kemenkeu.go.id)



# TIM REDAKSI

*Mini SIPIN - Sekilas Informasi Perkembangan Fiskal dan Ekonomi*

Pengarah

**Burhani AS**

Ketua Tim Redaksi

**Ahmar Rudi**

Penyunting

**Romeo Junianto**

Tim Redaksi

**Ernawati Maksudi, Rizka Andira Wulandari, Agatha Early  
Ameliana, Annisa Ainnur Farah, Sulistiana**

Desain dan Layout

**Yan Yosephin Saragi, Maisya Hanifah Salsabila, Raudya Tuzzahra,  
Allyza Nur Amalia**



Volume 01 Tahun 2024



*Mini*  
**SIPIN**

**KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI**

